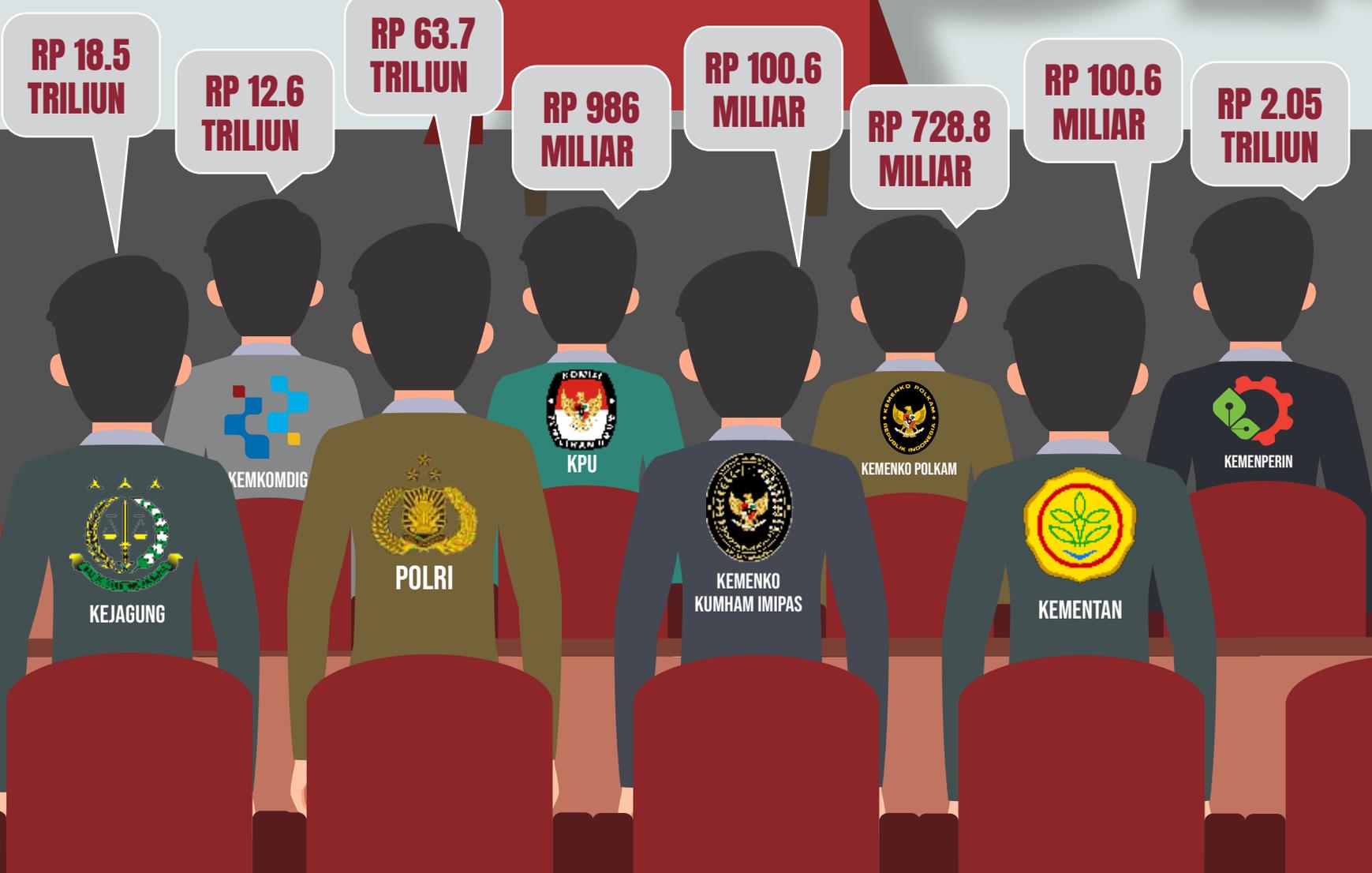


Beberapa lembaga pemerintah mulai dari Kementerian hingga aparat penegak hukum ramai-ramai mengajukan tambahan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kebutuhan guna menunjang kinerja masing-masing, mereka mengajukan tambahan anggaran miliaran hingga triliunan rupiah. Di antara yang telah mengajukan tambahan anggaran yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta tambahan anggaran Rp2,05 triliun; Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun atau naik dari penetapan sebelumnya Rp13,757 triliun; Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp100,6 miliar; Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun; Kemudian, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp18,5 triliun; Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar; Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun; dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp728,8 miliar. Lantas untuk apa sajakah penambahan anggaran tersebut?

BACA HAL 11...

# LEMBAGA PEMERINTAH RAMAI-RAMAI AJUKAN TAMBAHAN ANGGARAN



# INDONESIA DUKUNG PENUH ARAH BARU KERJA SAMA BRICS

Presiden RI, Prabowo Subianto, turut hadir dalam pertemuan dengan para pemimpin negara anggota BRICS tahun 2025 dan menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders' Declaration, dengan fokus pada penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

“Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah Leaders' Declaration dan dalam Leaders' Declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan reform dari global governance,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Rio de Janeiro, pada Minggu (06/07/2025) waktu setempat.

Poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

“Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” jelas Airlangga.

Airlangga juga menjelaskan bahwa poin ketiga dalam deklarasi menyangkut komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.

“Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable, yang fair and

inclusive development,” kata Airlangga.

Poin keempat dari Leaders' Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.

“Yang keempat adalah partnership for promotion, human, social, and cultural development. Nah itu outcome dari Leaders' Declaration,” ujarnya.

Airlangga juga mengatakan bahwa dalam forum BRICS ini, Presiden RI, Prabowo Subianto juga berharap kemanfaatan dari lembaga pembiayaan bentukan negara anggota BRICS, yakni New Development Bank (NDB), dapat ditingkatkan, terutama untuk kemitraan ekonomi negara berkembang.

“Kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa kemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa dalam sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global-south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).

Indonesia yang telah resmi menjadi anggota penuh BRICS mulai Januari 2025 ini telah menyatakan kesiapan untuk bergabung secara aktif dalam NDB. Partisipasi ini menjadi



Foto bersama para pemimpin negara-negara anggota BRICS.

penting agar Indonesia dapat mengakses pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Airlangga merinci bahwa saat ini NDB menangani sekitar

120 proyek yang berfokus pada energi bersih, infrastruktur, ekonomi hijau, dan berkelanjutan dengan nilai total mencapai 39 miliar dolar AS.

Dalam sesi kedua ini, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif "South-South Economic Compact". Menurut Wamenlu Tata, usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.

"Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan

perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain," kata Wamenlu.

KTT BRICS tahun ini menjadi pertemuan keempat yang digelar di Brasil dan yang kedua dipimpin langsung oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Selain Presiden Prabowo, juga hadir beberapa pemimpin negara anggota baru, antara lain Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed,

Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Putra Mahkota Abu Dhabi Khalid bin Mohammed bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi.

Para pemimpin negara anggota baru itu melengkapi kehadiran negara-negara pendiri seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Para pemimpin negara-negara BRICS menyambut Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, hal ini bersamaan dengan masuknya 10 negara mitra BRICS. "Kami menyambut Republik Indonesia sebagai anggota BRICS, demikian pula Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan sebagai negara mitra BRICS," ujar Pemimpin BRICS dikutip dari ddnews.

BRICS pada awalnya didirikan pada tahun 2009 dengan negara awalnya adalah Brazil, Rusia, India, dan China. Namun pada tahun 2010, Afrika Selatan resmi bergabung sebagai anggota BRICS. Setelah itu pada tahun lalu, BRICS resmi menambah anggota baru sejumlah enam negara, mulai dari Mesir, Indonesia, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Jika dilihat skala ekonomi negara-negara anggota BRICS, tercatat total Growth Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan mencapai US\$30,2 triliun atau setara dengan Rp489,546 triliun (asumsi kurs Rp16.230/US\$1) berdasarkan data GDP 2024.

Angka tersebut mencerminkan sekitar 27% dari total GDP global, yang mencapai US\$111,3 triliun atau setara dengan Rp1.806.699 triliun (asumsi kurs Rp16.230/US\$1). Capaian ini menunjukkan posisi strategis BRICS sebagai blok ekonomi negara berkembang yang memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian dunia.

Dalam KTT BRICS 2025 di Brasil, BRICS menyoroti tentang beberapa kondisi terkini geopolitik dan ekonomi global. Dalam KTT tersebut, BRICS mengutuk keras serangan terhadap Gaza dan Iran, serta mendesak reformasi institusi global, serta menegaskan posisi BRICS sebagai kekuatan multilateral baru yang siap mengisi kekosongan diplomasi internasional. (rls,ant/lut)



"Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,"

**ARRMANATHA NASIR**

Wakil Menteri Luar Negeri

# DPR RI Cecar Menkomdigi Terkait Pemerataan Sinyal

Komisi I DPR RI mencecar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) terkait pemerataan akses sinyal dan jaringan broadband bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, daerah yang belum mendapatkan akses sinyal ini tidak hanya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) saja, namun juga beberapa daerah non-3T juga masih ada yang belum terjangkau layanan digital tersebut.

**P**ada hal sebelumnya, Menkomdigi pernah menyatakan bahwa hanya wilayah 3T yang belum terjangkau sinyal. Sementara, berdasarkan pengakuan Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, mengatakan bahwa dia masih menemukan masih ada wilayah non-3T yang belum terjangkau sinyal.

"Tapi buktinya kami ke Dapil, kami ke masyarakat kami, masih banyak warga-warga di negara kita di wilayah non-3T yang belum tersentuh oleh jaringan sinyal. Saya minta asesmen dari Bu Menteri terkait dengan ini," tandas Rizki saat rapat kerja dengan Menkomdigi, Meutya Hafid, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Rizki mengungkapkan bahwa di periode sekarang Presiden RI Prabowo Subianto mempunyai tagline baru dan semangat baru. Sehingga, lanjutnya, Komisi I mendukung segala usulan, upaya, dan kebijakan dari Menteri Komdigi ataupun pemerintah secara holistik untuk menyentuh masyarakat di wilayah 3T.

Terkait dengan temuan yang disampaikan tersebut, secara khusus, Rizki menyoroti kondisi masyarakat yang berada di luar wilayah 3T seperti Pulau Jawa dan kota-kota penyangga. Dia mengatakan bahwa wilayah tersebut justru kerap kali luput dari perhatian dalam hal penguatan infrastruktur digital. Maka, dia meminta adanya asesmen terbaru dari Menkomdigi terhadap wilayah-wilayah non-3T yang faktanya masih belum sepenuhnya terlayani jaringan seluler dan broadband secara memadai.



Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, dalam rapat kerja dengan Menkomdigi, Meutya Hafid, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

"Masyarakat kita di Pulau Jawa, masyarakat kita yang berada bukan berada di wilayah 3T juga masih membutuhkan sentuhan. Saya butuh asesmen dari Ibu Menkomdigi, karena periode lalu kami sampaikan beberapa kali, jawaban dari Menteri sebelumnya tentu kalau wilayah Pulau Jawa sudah hijau Pak, kalau wilayah non-3T sudah hijau Pak," tuturnya.

Untuk itu, Rizki meminta Menkomdigi untuk menyiapkan langkah strategis dengan pendekatan insentif dan regulasi yang tegas kepada operator-operator seluler. Hal ini penting agar seluruh wilayah Indonesia, baik 3T maupun non-3T, dapat merasakan pemerataan pembangunan infrastruktur komunikasi dan digitalisasi.

"Diperlukan pendekatan 'carrot and stick' dari Bu Menkomdigi kepada operator-operator seluler, skema apa yang Bu Menteri siapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan sinyal ini," pungkas Legislator Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Ungkapan senada juga disuarakan Nico Siahaan. Dia menyoroti perkembangan terbaru terkait pembangunan infrastruktur internet.

"Tolong jelaskan progres dari pembuatan saluran internet di daerah-daerah, yang waktu itu BTS (oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi [Bakti] Komdigi)," ucap Nico.

Sorotan dengan pertanyaan-pertanyaan juga datang dari Andina Thresia Narang yang dengan terang-terangan menyebut bahwa beberapa daerah di Kalimantan Tengah belum ada sinyal internet.

"Setiap kali saya pulang reses Bu, pada RDP pertama saya mengangkat masih ada blankspot di Kalimantan Tengah, mungkin ini juga menjadi teriakan di semua provinsi Indonesia. Tetapi, saya melihat dengan adanya anggaran tahun 2026 peningkatannya juga tidak signifikan, bagaimana penanganannya dari Komdigi terkait internet," ungkapnya.

Tekait dengan masalah ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memberikan sorotan lebih tajam lagi. Dia lebih mempertanyakan skema penganggaran akses internet di daerah oleh Bakti. Sebab, skema penganggaran berada dalam struktur belanja Kemkomdigi RI.

Sukamta menyebutkan bahwa dalam pembahasan agenda laporan

keuangan APBN Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemkomdigi Tahun 2026, pagu indikatif Kemkomdigi sebesar Rp7,7 triliun. Anggaran tersebut terbagi Rp5,5 triliun diperuntukkan bagi pengembangan dan penguatan infrastruktur digital yang sebagian besar dikendalikan oleh Bakti.

"Kalau kita lihat Bakti di tahun 2024, nilai operasionalnya mencapai Rp9,7 triliun. Artinya, kebutuhan untuk Bakti bisa mencapai Rp12 triliun. Pertanyaannya, berapa yang untuk membangun infrastruktur dan berapa yang untuk operasional?" sorot Legislator Fraksi PKS tersebut.

Kemudian, Sukamta juga mempertanyakan kelanjutan pola pengelolaan yang selama ini menjadikan Bakti sebagai semacam operator penuh yang mengelola dan mendanai seluruh infrastruktur digital menggunakan APBN. Sukamta menilai perlu ada kajian mendalam untuk mencari alternatif model kelembagaan yang lebih ramping namun fungsional.

"Apakah akan begini terus? Ini kan setiap tahun harus ada negosiasi anggaran yang bikin dag-dig-dug. Perlu dipikirkan apakah Bakti akan terus berperan sebagai operator, ataukah ke depan kita buat lebih ramping, tapi tetap berfungsi penuh," tegasnya.

Lebih lanjut, Sukamta juga mengkritisi alokasi tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp12,6 triliun. Berdasarkan paparan Kemkomdigi, alokasi tersebut mencakup Rp7,7 triliun untuk Bakti, Rp2,7 triliun untuk pengembangan ekosistem ruang digital, Rp1,7 triliun untuk manajemen, serta Rp303 miliar untuk IKPM.

Namun, menurutnya, anggaran yang diajukan sejauh ini lebih bersifat rutin dan operasional, sementara rincian kegiatan dan program utama belum ditampilkan secara jelas.

"Kegiatan-kegiatan program belum tampak dalam perencanaan yang disampaikan. Mohon ditayangkan ulang program-program apa saja yang direncanakan akan didanai dari anggaran tambahan tersebut. Supaya ketika Menkeu beri pelonggaran, kita sudah tahu betul arah kegiatannya," tandasnya.

Sukamta juga meminta Kementerian menghadirkan dokumen atau surat resmi dari Kemenkeu dan Bappenas terkait usulan program agar pembahasan di Komisi I menjadi lebih komprehensif dan tidak harus berulang di kemudian hari. (rls,ist/lut)



Masyarakat kita di Pulau Jawa, masyarakat kita yang berada bukan berada di wilayah 3T juga masih membutuhkan sentuhan. Saya butuh asesmen dari Ibu Menkomdigi, karena periode lalu kami sampaikan beberapa kali, jawaban dari Menteri sebelumnya tentu kalau wilayah Pulau Jawa sudah hijau Pak, kalau wilayah non-3T sudah hijau Pak,"

**RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH**  
Anggota Komisi I DPR RI

# GADUH IKN: BIAYA PERAWATAN TINGGI HINGGA PROSTITUSI

**Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap I periode 2022-2024 telah rampung 100 persen. Ini menandai selesainya fase awal pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di jantung ibu kota baru Indonesia. Namun kabar tak sedap mengiringi, mulai dari biaya perawatan tinggi hingga merebaknya prostitusi.**

**S**atuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara, menertibkan puluhan orang perempuan yang diduga sebagai pramunikmat atau penaja seks komersial (PSK) di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, dalam operasi penertiban sepanjang 2025.

"Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN," ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali ketika ditanya mengenai penanganan penyakit sosial di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (7/7/2025).

Ali mengatakan pemantauan dan operasi penertiban dilakukan agar sekitar wilayah calon ibu kota negara Indonesia tersebut bersih dari penyakit sosial masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban sepanjang 2025, di seluruh wilayah kecamatan, termasuk di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah IKN.

Personel Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara terus melakukan patroli penertiban di wilayah IKN karena kendati sudah ada Otorita IKN, tetapi secara administratif penegakan peraturan daerah (perda) masih jadi kewenangan pemerintah kabupaten setempat.

Dalam tiga kali operasi penertiban terakhir, kata Ali, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 perempuan diduga penaja seks atau pelaku praktik prostitusi.

"Operasi pertama petugas

tertibkan dua orang pelaku, dan operasi kedua 32 orang ditertibkan, serta operasi ketiga 30 orang ditertibkan," tambahnya.

Hasil keterangan yang didapat praktik prostitusi kebanyakan dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi media sosial, dan para penaja seks komersial tersebut menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp300 ribu per malam,

"Pelaku prostitusi itu tawarkan jasa dengan harga antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu sekali kencan," katanya.

Ali mengatakan para pelaku praktik prostitusi kebanyakan berasal Samarinda, Balikpapan Bandung, Makassar dan Yogyakarta. Setelah dilakukan pembinaan, para pelaku praktik prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta segera



Satpol PP Penajam Paser Utara jaring PSK di wilayah IKN. (Dok. Satpol PP Penajam Paser Utara)

meninggalkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari.

Terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menagih janji pemerintah soal keterlibatan investor dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Biaya pemeliharaan aset IKN yang ditaksir mencapai Rp300 miliar, terlalu membebani APBN.

"Janji (pemerintah terkait) lebih banyak melibatkan investor harus diwujudkan, untuk mengurangi beban APBN," kata Wijayanto.

Ia mengingatkan, biaya pemeliharaan aset akan bertambah

setiap tahunnya sehingga berpotensi memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Keterlibatan investor bisa membuat negara terhindar dari ancaman 'sesaknapas'.

"Nilai ini tentunya sangat besar disaat kondisi keuangan kita sedang buruk. Diperkirakan nilai tersebut akan berlipat di tahun-tahun mendatang," ungkapnya. (wid,rls,ini,kcm/dya)

## TAHAPAN PEMBANGUNAN IKN HINGGA 2045

- **Tahap I (2020–2024):** Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
- **Tahap II (2025–2029):** Penyambungan infrastruktur ke wilayah baru
- **Tahap III (2030–2034):** Pengembangan sistem transportasi, limbah, dan air
- **Tahap IV (2035–2039):** Perluasan kawasan perkotaan ke utara IKN
- **Tahap V (2040–2045):** Pembangunan kawasan industri dan ekonomi berkelanjutan

*\*Bahkan setelah 2045, pengembangan IKN akan terus berlanjut mengikuti inovasi dan teknologi terbaru.*

**Pada 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 13,5 triliun untuk pembangunan tahap dua ini, yang terdiri dari:**

- Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN
- Tambahan Rp 8,1 triliun khusus untuk gedung legislatif dan yudikatif
- Selain itu, tender proyek baru senilai Rp 3,4 triliun juga telah digulirkan, difokuskan pada pembangunan jalan dan infrastruktur zona KIPP 1A, 1B, dan 1C.



## Menko Muhaimin: Waduh Gawat, Harus Dicek Ini

**MENTERI** Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkejut mendengar kabar ramainya praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Cak Imin berpandangan, kondisi ini sudah mulai gawat bagi IKN.

"Waduh, masa iya?" ujar Cak Imin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). "Waduh, gawat, gawat, gawat. Kok bisa gawat gitu," lanjutnya.

Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, situasi tersebut harus dicek langsung. Dia mengaku akan mengecek langsung ke IKN terkait PSK yang menjamur di IKN ini. "Wah ini harus dicek ini, harus dicek. Iya dong (cek langsung)," imbu Cak Imin.

Terkait asal PSK dan pelanggannya, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP PPU, Rahmadi menjelaskan, mayoritas para pelanggan PSK tersebut berasal dari luar kota. Ada penduduk lokal, tapi tidak banyak.

"Untuk pelanggan sendiri sebenarnya banyak dari luar provinsi. Mohon maaf, dari rekan-

rekan kita dari Jawa Barat, dari Makassar, dari Balikpapan, dari Bandung juga ada. Kalau yang lokalannya nggak terlalu banyak. Paling ada satu-dualah," ungkap dia.

Bahkan, menurutnya, ada juga pihak-pihak seperti kuli yang membangun bangunan di IKN. "Iya, benar sekali. Kalau untuk pegawai atau kuli ada," tuturnya.

Sementara, PSK itu berasal Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Setelah dilakukan pembinaan, pelaku praktik prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta segera meninggalkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari.

Jadi, para PSK itu bekerja sama dengan pihak warung kopi di Kecamatan Sepaku. Di warung itu kemudian dibangun sekat-sekat yang dijadikan kamar untuk bercinta.

"Nah, kalau offline itu, dia modulusnya menjajakan kopi-kopi di pinggir jalan. Tapi di warung itu, dia punya sekat-sekat kamar. Dan bisa dibedakan, ciri-cirinya warung yang murni jualan kopi dengan kopi plus bisa dibedakan," urainya. (wid,rls,tmo/dya)

# Temuan PPAATK: 571 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang 2024. Data menyebut transaksi mencapai 7,5 juta kali dengan nilai Rp957 miliar.



Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat bertemu dengan Kepala PPAATK Ivan Yustivanda di Kantor PPAATK, Jakarta, Jumat (4/7/2025). (Dok.ist)

Data tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Humas PPAATK, M Natsir Kongah dalam siaran pers, pada Senin (7/7/2025). "Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp957 miliar," ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data tersebut, terdapat 571.410 orang penerima bantuan sosial yang juga terindikasi bermain judi online.

Berdasarkan data PPAATK 2024, ada 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang menerima bansos. Sementara, ada 9,7 juta NIK yang terindikasi bermain judol.

"Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online," kata Natsir.

"Dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar," tambahnya.

Ia menilai, hal itu bukan lagi penyimpangan administratif, melainkan termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.

Sebagai gambaran, total penerima bansos tercatat 28,4 juta berdasarkan basis data NIK dengan 9,7 juta NIK adalah pemain judi online.

## DPR Soroti Maladministrasi

Di sisi lain, Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menemukan masalah maladministrasi terkait pencairan bantuan sosial (bansos). Itu terungkap setelah Selly bertemu ribuan warga penerima bansos di Cirebon dan Indramayu.

Menurut dia, banyak dari mereka kesulitan mencairkan dana hanya karena masalah maladministrasi. "Kejadian ini telah ada sejak 2018, bahkan di 2023 ada 16 ribu penerima yang bermasalah. Bukan karena judi online melainkan ketidaksesuaian antara DTSN atau KK dan KTP dengan KYC (Know Your Customer) di perbankan," ujar Selly di sela kunjungan ke Dapil Jabar VIII, Sabtu (5/7/2025).

Sebagai komitmen Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan

membantu masyarakat kecil, Selly yang merupakan anggota Fraksi PDIP meminta Kemensos dan PPAATK segera membuka data lebih jauh sehingga tidak memberikan stigma negatif kepada penerima yang notabene masyarakat prasejahtera.

Misalnya, penerima bansos bernama Darsinih yang tertera di KTP dan DTSN, sementara di KYC namanya menggunakan huruf H, Darsini. Padahal, NIK, alamat, dan orang tuanya sama. Namun, pencairan tidak bisa dilakukan.

"Tentunya berakibat pada terakumulasinya bantuan sosial. Ketidaksihinggaan data ini sering terjadi ketika perpaduan data dilaksanakan antara lembaga baik DTSN dengan Adminduk ataupun dengan KYC perbankan," ujarnya.

Meski upaya mengadvokasi telah

dilakukan oleh pekerja sosial, namun hal itu tidak lantas membuat penyaluran bisa dilakukan. Karena itulah, mantan Plt Bupati Cirebon itu meminta PPAATK menyelidiki dan merinci sehingga mengetahui siapa yang diuntungkan maupun dirugikan karena maladministrasi.

"Berapa tahun uang itu mengendap di perbankan, adakah pembiaran, apakah ada indikasi pembiaran laporan dari petugas lapangan, dan seterusnya," kata Selly.

Sebelumnya, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda menyebut penjudi online tak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Alasannya, menurut Nailul, secara hukum, judi merupakan kegiatan yang dilarang oleh negara.

Ketika pelaku dengan sadar

## Peringatan Mensos: Rekening Dipakai Judol Tak Lagi Terima Bantuan

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti digunakan untuk judi online (judol) akan dilakukan edukasi dan evaluasi. Bisa jadi tidak boleh lagi menerima bansos.

"Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih bijak, lebih hati-hati, dan patuh terhadap aturan yang ada," ujarnya.

Kementerian Sosial sebelumnya telah berkoordinasi dengan PPAATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos yang lebih dari 10 bahkan 15 tahun. Kebijakan ini untuk menindaklanjuti

arahan Presiden Prabowo agar bansos tepat sasaran.

"Kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, dan saat yang sama PPAATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami meminta izin kepada Presiden untuk berkoordinasi," tutur Gus Ipul.

Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos kemudian menyerahkan nomor-nomor rekening tersebut kepada PPAATK.

Menanggapi hasil temuan PPAATK tersebut, Gus Ipul akan menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran bansos selanjutnya. "Ini bagian langkah pemerintah

bermain judi, kata Nailul, artinya mereka melanggar aturan yang diatur negara. "Mereka tidak bisa disebut korban," kata dia.

Menurut dia, seseorang bisa disebut korban jika mereka tertipu dengan dalih investasi yang ternyata di baliknya ada praktik judi online. Pemain judi menurut Nailul tak bisa dikategorisasi sebagai penerima bansos lantaran kriteria penerima bansos adalah masyarakat yang masuk kategori miskin atau kurang mampu.(wid,rls,ant/dya)

## 5 KOTA/KABUPATEN DENGAN PELAKU JUDI ONLINE ANAK TERBANYAK

Jakarta Timur

4.563

Kabupaten Bogor

4.432

Jakarta Barat

4.377

Jakarta Selatan

3.971

Bandung

3.478

khususnya Kementerian Sosial, menindaklanjuti arahan presiden dalam rangka memastikan bansos tepat sasaran," katanya.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan baru kali ini ada upaya pengecekan rekening penerima bansos untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan bantuan, termasuk untuk aktivitas judi online.

"Di publik dugaannya dua, bermain secara individual, dugaan kedua sifatnya ada yang mengatur, sehingga ini bisa bermain secara 'cantik' bahasanya. Hingga saat ini baru sekarang dilakukan setelah menteri baru ini dan kebijakan presiden yang sekarang, yang dulu kan sudah berlangsung lama. Ini pun dari tahun 2022 sampai 2024 yang sudah dianalisa dan itu baru satu bank," urainya.(wid,ist,one/dya)

# DPRD Kota Malang Kritik Tingginya SiLPA APBD 2024: Serapan DBHCHT Tak Optimal

**MALANG** - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2024 tercatat cukup tinggi. Pemicunya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tak terserap secara optimal.

Kritikan pun dilontarkan DPRD Kota Malang yang mengusulkan agar pemanfaatan cukai rokok dialihkan untuk mendukung layanan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan Badan Anggaran (Banggar), nilai SiLPA tahun 2024 mencapai Rp204 miliar. Angka ini naik dari tahun 2023, yakni sebesar Rp199 miliar.

"Walaupun secara tren, laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menurun, kita tetap harus memahami apa yang menjadi penyebab timbulnya SiLPA. Apakah ada program-program yang mestinya bisa dinikmati masyarakat tetapi tidak tersalurkan?" ujar Amithya, Senin (7/7/2025).

Untuk diketahui, pada APBD TA 2021, nilai SiLPA mencapai Rp484 miliar. Kemudian menurun menjadi Rp460 miliar pada 2022, dan kembali turun menjadi Rp199 miliar di 2023. Namun kembali naik di TA 2024,

sebesar Rp204 miliar.

Amithya menyoroti salah satu penyebab tidak terserapnya anggaran, yakni dari pos Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dana ini, menurutnya, kerap tidak dapat disalurkan maksimal karena terikat ketat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai penggunaannya.

"Di Kota Malang sendiri buruh pabrik rokok itu tidak banyak, sementara regulasi pusat mengatur bahwa DBHCHT salah satunya diperuntukkan bagi kelompok tersebut. Maka kami akan membuat skema untuk berkonsultasi dan berharap adanya diskresi dari pusat," kata perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini.

DPRD Kota Malang pun berharap agar Pemkot dapat mengupayakan penggunaan DBHCHT bisa lebih fleksibel. Namun tetap dalam koridor yang ditetapkan. Salah satu usulan pemanfaatannya adalah untuk mendukung program kesehatan masyarakat seperti Universal Health Coverage (UHC).

"Sasaran bisa diperluas, misalnya direkomendasikan untuk program

UHC. Masih dalam koridor aturan tapi lebih bermanfaat secara luas bagi warga Kota Malang," imbuhnya.

Senada dengan itu, Juru Bicara Banggar DPRD Kota Malang, Lelly Theresiawati, menegaskan DBHCHT selama ini kerap berkontribusi pada tingginya SiLPA akibat tidak terserapnya anggaran. Hal ini, menurutnya, terjadi karena keterbatasan fleksibilitas penggunaan dan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

"Kami mendorong agar Pemkot Malang aktif melakukan advokasi dan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Supaya penggunaan DBHCHT dapat lebih difokuskan pada program-program yang langsung dirasakan masyarakat," terang Lelly.

Menanggapi sorotan DPRD tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu



Pariipurna DPRD Kota Malang penjelasan Banggar terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Senin (7/7/2025). (Santi/Lentera)

Hidayat, mengatakan pihaknya tengah mengevaluasi penyebab utama kenaikan SiLPA. Evaluasi tersebut akan disampaikan dalam paripurna Jawaban Wali Kota bersama DPRD pada Rabu (9/7/2025).

"Penyebab tingginya SiLPA salah satunya adalah regulasi yang menghambat pencairan anggaran untuk kegiatan tertentu. Beberapa kegiatan akhirnya tidak bisa terlaksana," ungkapnya. (Santi/Dya)

## Realisasi Pendapatan Kabupaten Malang Sentuh 44,19%, Tertinggi dari Pajak Reklame



Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara. (dok. Ist)

**MALANG** - Memasuki semester kedua tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malang mencapai angka 44,19 persen. Atau sebesar Rp 321,33 miliar dari total target pendapatan daerah Rp 727,2 miliar.

"Kalau kita lihat ini ada peningkatan sebesar 9,8 persen dibandingkan capaian awal Juni 2025

kemarin. Ya, artinya bertambah sekitar Rp 71,23 miliar, lah. Dari semua, dari 12 jenis pajak yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)," ujar Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, Senin (7/7/2025).

Made menambahkan, berdasarkan data, realisasi tertinggi berasal dari Pajak Reklame. Dari target Rp4,92 miliar telah terealisasi sebesar 65 persen atau sekitar Rp3,2 miliar.

Diikuti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman (mamin), dengan realisasi 59,71 persen atau senilai Rp10,87 miliar dari target Rp18,21 miliar.

Sedangkan untuk sektor PBJT jasa kesenian dan hiburan, menurutnya juga menunjukkan kontribusi yang

cukup signifikan. Dengan capaian 58,23 persen dari target Rp 7,82 miliar, atau sekitar Rp 4,55 miliar. Pajak air tanah menyusul dengan realisasi 59,8 persen dari target Rp 6,64 miliar atau Rp 3,97 miliar.

Sementara itu, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga mencatat pertumbuhan. Disebutkannya, per awal Juli 2025 ini, PBB telah terealisasi sebesar 37,18 persen atau Rp42,2 miliar dari target Rp113,5 miliar. Sebelumnya, per awal Juni 2025, capaian PBB masih di angka 21,95 persen atau Rp24,91 miliar.

"Kalau untuk BPHTB, realisasinya sudah mencapai 37,43 persen atau Rp81,93 miliar dari target Rp 218,86 miliar. Sama seperti PBB, BPHTB ini juga meningkat dari posisi di awal Juni 2025 itu tercatat di 29,27 persen atau sekitar Rp64,07 miliar," katanya.

Made menyampaikan, peningkatan realisasi PBB terjadi seiring dengan pendekatan masa jatuh tempo pembayaran yang dijadwalkan pada Agustus 2025 mendatang. Pada periode ini, menurutnya masyarakat

cenderung mulai aktif memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

"Sekarang masih terus proses, dan untuk PBB memang mendekati jatuh tempo Agustus, biasanya masyarakat mulai membayar," sambungnya.

Adapun sektor PBJT jasa perhotelan, menurutnya telah mencapai realisasi sebesar 55,87 persen atau Rp4,19 miliar dari target Rp7,51 miliar. PBJT tenaga listrik menyumbang Rp60,48 miliar atau 47,20 persen dari target Rp128,13 miliar.

Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) menyumbang 47,36 persen dari target Rp870,82 juta atau Rp412,46 juta. Kemudian PBJT jasa parkir mencatat realisasi sebesar 40,32 persen dari target Rp1,58 miliar atau Rp640,39 juta.

"Dari sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), telah terealisasi Rp75,45 miliar dari target Rp157,32 miliar atau 47,96 persen. Sedangkan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp33,4 miliar dari target Rp61,78 miliar atau 54,07 persen," katanya. (Santi/Dya)

# IRAN DEPORTASI WARGA AFGANISTAN, PENOLAK AKAN DITANGKAP

Pemerintah Iran telah menetapkan batas waktu bagi jutaan migran dan pengungsi Afghanistan untuk meninggalkan wilayahnya. Kini, mereka yang masih bertahan terancam ditangkap karena tenggat tersebut telah berlalu.

**P**emerintah menyampaikan pengumuman pada Minggu (6/7/2025), bertepatan dengan berakhirnya batas waktu bagi warga Afghanistan untuk meninggalkan Iran.

Rencana Iran mengusir warga Afghanistan menuai keprihatinan berbagai organisasi kemanusiaan. Mereka khawatir deportasi massal akan memicu instabilitas di Afghanistan.

Saat ini Afghanistan adalah salah satu negara paling miskin di dunia. Sedangkan data teranyar menunjukkan ada sekitar 4 juta migran dan pengungsi Afghanistan di Iran.

Afghanistan adalah negara yang terkurung daratan (landlocked) di persimpangan Asia Tengah dan Asia Selatan. Negara ini berbatasan dengan enam negara lain, termasuk Iran.

Adapun pada 2023 Iran meluncurkan kebijakan mengusir warga asing yang tinggal di negaranya secara ilegal. Kebijakan itu dituduh mengincar warga Afghanistan.

Sejak saat itu, lebih dari 700.000 warga Afghanistan telah meninggalkan negara itu, dan ratusan ribu lainnya terancam diusir. Lebih dari 230.000 orang telah meninggalkan negara itu pada bulan Juni saja, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Maret 2025, pemerintah Iran menyatakan, para pengungsi Afghanistan harus meninggalkan negaranya secara sukarela sampai 6 Juli. Jika tidak, maka akan diusir

sampai ditangkap.

Menurut organisasi urusan imigran PBB (IOM), sejak ancaman itu dilontarkan, sebanyak 700 ribu warga Afghanistan telah meninggalkan Iran. Pada Juni lalu sebanyak 230 ribu warga Afghanistan dideportasi.

Padahal mayoritas warga Afghanistan kabur dari negaranya karena alasan perang, kemiskinan sampai tak mau berada di bawah kekuasaan Taliban.

Seorang warga Afghanistan di Iran, Batoul Akbari, mengatakan di negara tempatnya tinggal ada sentimen anti-Afghanistan.

"Sakit hati melihat warga diusir dari rumah satu-satunya yang saat ini mereka tahu," ujar Akbari seperti dikutip dari Al-Jazeera.

"Lahir di Afghanistan membuat perasaan kami punya dua kampung halaman. Keluarga kami berasal dari



Pengungsi Afghanistan tiba dari Iran di perbatasan Islam Qala antara Afghanistan dan Iran, Sabtu (5/7/2025). (Foto: AFP)

Afghanistan, tapi di sini yang selalu kami tahu sebagai rumah," sambung Akbari.

Diketahui akhir bulan lalu, UNHCR mengatakan, dari 1,2 juta warga Afghanistan yang kembali, lebih dari separuhnya datang dari Iran setelah pemerintahnya menetapkan batas waktu pada 20 Maret.

"Mereka datang dengan bus-bus, dan terkadang lima bus tiba pada saat yang sama bersama keluarga dan orang-orang lain, dan orang-orang itu diturunkan dari bus, dan mereka hanya kebingungan, kehilangan arah, lelah, dan juga lapar," kata Arafat Jamal, perwakilan UNHCR di Afghanistan saat ia menggambarkan pemandangan di perbatasan.

"Hal ini diperburuk oleh perang, tetapi saya harus mengatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari tren mendasar yang telah kita lihat dalam pemulangan para pengungsi dari Iran, beberapa di antaranya bersifat sukarela, tetapi sebagian besar juga merupakan deportasi."

Resul Serdar dari Al Jazeera, melaporkan dari Teheran, mengatakan warga Afghanistan semakin disalahkan atas kesulitan ekonomi, kekurangan dan masalah sosial di Iran.

"Tuduhan-tuduhan ini dipicu oleh retorika politik dan kampanye media sosial menyusul konflik 12 hari antara Iran dan Israel serta klaim bahwa Israel telah merekrut warga Afghanistan sebagai mata-mata," katanya. (Al Jazeera, ist/nei)

## Israel Harus Dihukum atau Terus Bikin Onar Timteng

**MENTERI** Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Israel perlu dimintai pertanggungjawaban atas serangannya terhadap Iran. Ia memperingatkan, tanpa adanya sanksi atau tindakan tegas, Israel akan terus bertindak semena-mena di Timur Tengah.

Bukan tak mungkin, kata Araghchi, negara-negara lain di Timur Tengah akan menjadi target berikutnya.

Dalam pidatonya di KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025), Araghchi menegaskan pentingnya meminta pertanggungjawaban Israel dan Amerika Serikat (AS) atas pelanggaran hukum internasional, termasuk hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter.

Konsekuensi dari agresi AS-Israel, lanjut dia, tidak akan terbatas pada satu negara saja.

"Seluruh kawasan dan sekitarnya akan menderita," kata Araghchi, seperti dikutip dari Anadolu, Senin (7/7/2025).

"Serangan AS-Israel terhadap fasilitas nuklir kami merupakan pelanggaran berat terhadap NPT (perjanjian Non-Proliferasi Nuklir) dan resolusi DK PBB 2231 yang telah mendukung program nuklir damai Iran pada 2015 melalui konsensus," ujarnya, menambahkan.

Dia menambahkan, keterlibatan AS dalam menyerang instalasi nuklir damai Iran juga tidak diragukan lagi, membuktikan keterlibatan penuh pemerintah Negeri Paman Sam dengan agresi Israel.

Para pemimpin BRICS



Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berbicara kepada AFP selama wawancara di konsulat Iran di Jeddah pada 7 Maret 2025. (AFP / Getty Images)

mengeluarkan pernyataan bersama, Minggu (6/7/2025) sore, salah satunya mengutuk serangan Israel dan AS ke fasilitas nuklir Iran.

Sebanyak 10 negara anggota BRICS, termasuk Indonesia, menyebut serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai Iran sebagai pelanggaran hukum internasional. (Anadolu, ist/nei)

# Ablasi Retina, Masalah Serius yang Dialami Dewi Yull

**A**blasi retina atau retinal detachment adalah kondisi ketika retina mengalami robekan. Kondisi inilah yang menimpa penyanyi dan aktris senior Dewi Yull hingga menyebabkan mata kanannya kehilangan fungsi penglihatan. Dokter spesialis mata dr Elvioza, SpM(K), menjelaskan semakin bertambahnya usia, retina yang sudah tipis ini akan semakin tipis.

"Jadi, awalnya terjadi robekan dulu pada retina. Kemudian, dari robekan ini masuk cairan, hingga retinanya terlepas," kata dr Elvioza, dikutip pada Senin (7/7/2025).

"Setelah retina terlepas, yang kita sebut sebagai ablasio retina atau retina detachment ini. Nah, penglihatan terganggu sampai hilang penglihatan," tambahnya.

Salah satu faktor pemicu terjadinya ablasio retina adalah miopi atau mata dengan minus yang sangat tinggi. dr Elvioza menyebut mata minus yang tinggi itu sudah di atas lima. Seperti yang diketahui, kedua mata Dewi Yull memang minus. Sebelah kanan mencapai minus 25 dan minus 19 pada mata kiri.

Menurut dr Elvioza, dengan bertambahnya usia, retina yang sudah tipis ini akan semakin tipis. Sehingga mudah terjadi robekan, retina terlepas, hingga terjadi ablasio retina.

"Jadi, biasanya ablasio retina terjadi pada orang-orang tua yang usia tua di atas 50 tahun. Karena semakin bertambahnya usia, retina semakin rapuh. Apalagi pada orang yang sudah dasarnya punya minus tinggi, semakin rapuh," jelasnya.

Ketika ditanya penyebab lainnya, dr Elvioza menekankan dalam dunia kedokteran tidak ada istilah penyebab atau sebab akibat. Lebih pada faktor risiko seseorang yang bisa mengalami ablasio retina. dr Elvioza menyebutkan beberapa faktor risiko yang bisa membuat seseorang kemungkinan besar mengalami kondisi tersebut.

"Hal-hal yang memberikan risiko terjadi operasi retina tadi minus tinggi di atas lima, usia di atas 50 tahun atau lebih," kata dr Elvioza.

"Selain itu bisa juga karena terjadinya trauma atau pernah ada benturan pada matanya, pernah terjadi peradangan pada mata, hingga genetik atau keturunan," tuturnya.

## Jenis dan Penyebab

Ablasi retina terjadi ketika retina mata terlepas dari pembuluh darah yang membawa oksigen dan nutrisi. Berdasarkan mekanisme yang menyebabkan lepasnya retina mata, ablasio retina terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

## Ablasi Retina Regmatogenosa

Ablasi retina regmatogenosa merupakan jenis ablasio retina yang paling sering terjadi. Ablasi retina jenis ini terjadi ketika robekan pada retina membuat cairan di tengah bola mata (cairan vitreus) merembes masuk dan menumpuk di belakang retina. Kondisi tersebut membuat lapisan retina terlepas dari dasarnya.

Umumnya, robekan pada ablasio retina regmatogenosa terjadi akibat perubahan tekstur pada cairan vitreus seiring pertambahan usia. Robekan juga bisa terjadi karena beberapa kondisi, yaitu rabun jauh, cedera mata, serta operasi mata.

## Ablasi Retina Eksudatif

Ablasi retina eksudatif terjadi ketika terdapat cairan atau darah yang menumpuk di belakang retina sehingga retina terlepas. Akan tetapi, pada jenis ini, cairan yang menumpuk tidak menimbulkan robekan pada retina.

Penumpukan cairan di mata umumnya terjadi akibat kebocoran pembuluh darah atau adanya pembengkakan di bagian belakang mata. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cedera atau trauma pada mata, degenerasi makula, tumor mata, serta peradangan pada mata. Selain itu, penyebab lainnya adalah penyakit Coats, yaitu penyakit langka yang menyebabkan kelainan perkembangan pada retina mata.

## Ablasi Retina Traksional

Jenis ini terjadi ketika terdapat jaringan parut yang membuat retina tertarik dan lepas. Jaringan parut ini umumnya terbentuk akibat retinopati diabetik, yaitu gangguan mata yang terjadi pada penderita diabetes. Retinopati diabetik dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah mata. Dengan kata lain, ablasio retina traksional lebih sering dijumpai pada penderita diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkontrol.

## Faktor Risiko

Terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami ablasio retina. Risiko ini lebih tinggi pada

individu yang berusia di atas 50 tahun, pernah mengalami ablasio retina sebelumnya, atau memiliki riwayat ablasio retina dalam keluarga.

Cedera parah pada mata juga dapat memicu kondisi ini, begitu pula dengan penderita rabun jauh (miopia) yang parah. Selain itu, orang yang pernah menjalani operasi mata, seperti operasi katarak, atau yang menderita penyakit mata tertentu seperti radang pada lapisan tengah mata (uveitis), juga memiliki risiko lebih besar untuk mengalami ablasio retina.

## Pencegahan

Ablasi retina tidak selalu dapat dicegah, terutama jika disebabkan oleh proses penuaan. Namun, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risikonya. Salah satunya adalah dengan rutin memeriksakan kesehatan mata, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, atau berusia lanjut.

Penggunaan alat pelindung mata saat berolahraga juga penting untuk menghindari cedera serius pada mata. Banyak cabang olahraga, seperti badminton, squash, atau olahraga kontak fisik, berpotensi menyebabkan benturan langsung ke area mata. Dengan menggunakan pelindung khusus, risiko trauma pada bola mata dapat diminimalkan.

Selain itu, segera konsultasi ke dokter mata jika muncul gejala seperti floaters (bintik-bintik atau bayangan kecil yang melayang di bidang penglihatan), kilatan cahaya (flash), atau adanya tirai gelap yang tampak menutupi sebagian penglihatan. Gejala-gejala tersebut bisa menjadi tanda awal terjadinya masalah serius pada retina, termasuk risiko ablasio retina, yang jika terlambat ditangani dapat menyebabkan kebutaan permanen.

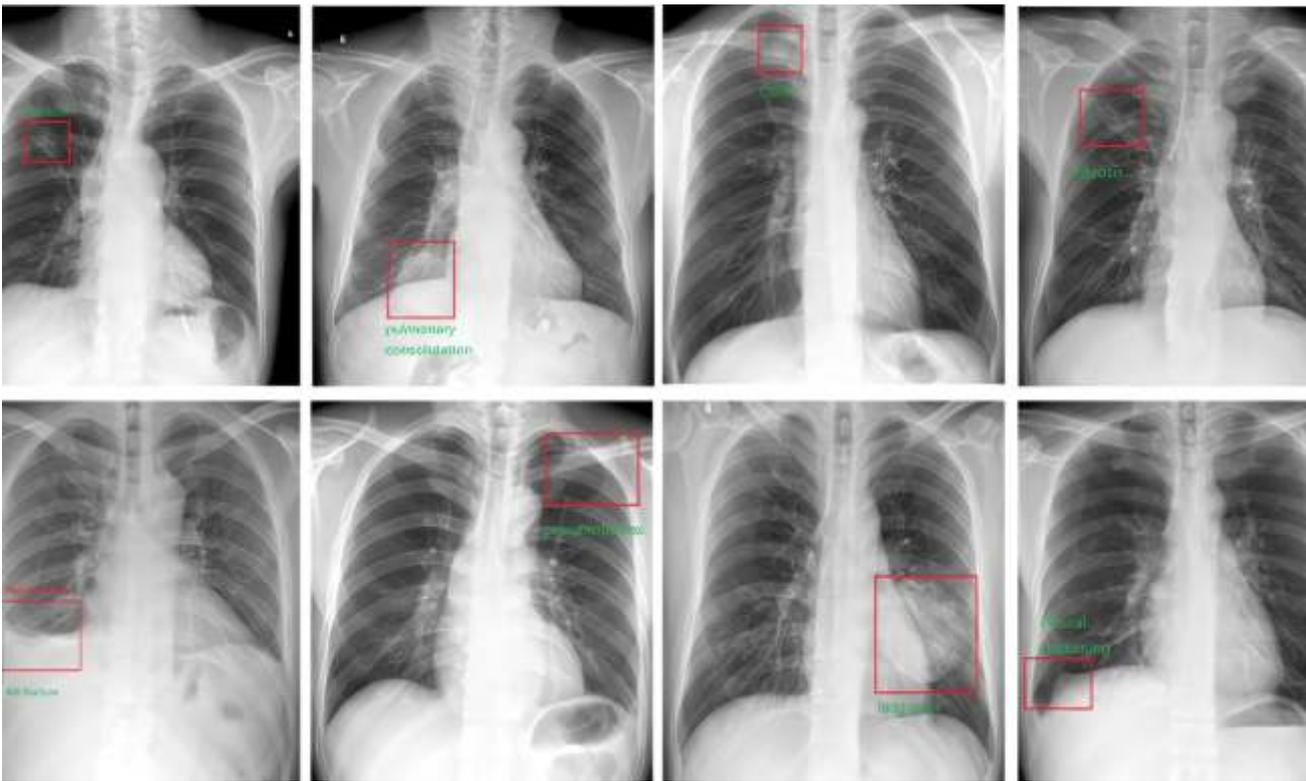
Pemeriksaan mata sebaiknya dilakukan minimal sekali dalam setahun untuk mendeteksi sejak dini adanya kelainan pada retina dan bagian mata lainnya.

Frekuensi pemeriksaan bisa lebih sering, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti penderita diabetes atau hipertensi, mengingat kedua kondisi ini dapat merusak pembuluh darah retina. (nei,ist/dya)





# AI BANTU DETEKSI PENYAKIT LIVER LEWAT RONTGEN DADA



**P**opularitas kecerdasan buatan (AI) terus meningkat. Tak hanya mampu menjawab berbagai pertanyaan, dari yang sederhana hingga rumit, AI kini juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit pada organ hati manusia dengan tingkat akurasi yang mencapai 95 persen.

Tim peneliti di Jepang tengah mengembangkan pendekatan baru untuk mendeteksi gangguan pada organ hati. Fokus utama mereka adalah mengidentifikasi kondisi pasien yang mengalami penyakit hati berlemak (fatty liver disease).

Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan lemak di hati. Kondisi ini diperkirakan menyerang satu dari empat orang di seluruh dunia. Jika

tidak diobati, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti sirosis dan kanker hati, sehingga sangat penting untuk mendeteksinya sejak dini dan memulai pengobatan.

Sebenarnya, ada banyak tes standar untuk mendiagnosis penyakit hati berlemak, seperti USG, CT, dan MRI. Namun, umumnya peralatan tersebut adalah fasilitas khusus yang mahal dan perlu antri untuk menggunakannya.

Alternatif lain yang lebih cepat ialah rontgen dada karena, relatif murah dan paparan radiasinya yang rendah. Meskipun tes ini terutama digunakan untuk memeriksa kondisi paru-paru dan jantung, tes ini juga menangkap bagian hati, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi

tanda-tanda penyakit hati berlemak.

Kendati demikian, korelasi antara rontgen dada dan penyakit hati berlemak sebenarnya jarang menjadi subjek untuk studi mendalam.

Penelitian yang dipimpin oleh Associate Professor Sawako Uchida-Kobayashi dan Associate Professor Daiju Ueda di Sekolah Pascasarjana Kedokteran Osaka Metropolitan University mengembangkan model AI yang dapat mendeteksi keberadaan penyakit hati berlemak dari gambar rontgen dada.

"Pengembangan metode diagnostik menggunakan sinar-X dada yang mudah diperoleh dan murah berpotensi meningkatkan deteksi perlemakan hati. Kami berharap metode ini dapat digunakan secara praktis di masa

mendatang," kata Kobayashi dilansir Eurekalert.

Dalam studi retrospektif ini, ada total 6.599 gambar rontgen dada dari 4.414 pasien dengan rentang umur yang berbeda dengan usia rata-rata 56 hingga 58 tahun.

Data ini kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan dan melatih model AI dan memanfaatkan skor parameter atenuasi terkontrol (CAP). Model AI lalu diverifikasi sangat akurat, dengan area di bawah kurva karakteristik operasi penerima (AUC) berkisar antara 0,82 hingga 0,83.

AUC adalah ukuran seberapa baik model bisa membedakan antara pasien yang memiliki penyakit dan yang tidak. Nilai maksimal AUC adalah 1,0. Dengan AUC mendekati 0,83, ini berarti AI mampu membedakan kasus fatty liver disease dengan tingkat akurasi klasifikasi sekitar 82-83%, yang termasuk dalam kategori "baik" dalam standar medis diagnostik.

Selain AUC, studi ini juga menunjukkan metrik performa lain seperti akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Akurasi metode ini ada di rentang 76-77%. Artinya, 3 dari 4 diagnosis oleh AI cocok dengan hasil klinis. Sensitivitas (kemampuan AI mendeteksi kasus yang benar-benar positif) berada di angka 68-76%, sedangkan spesifisitas (kemampuan mengenali pasien sehat) berada di 76-82%.

Metode ini cukup andal untuk mendeteksi fatty liver disease secara luas, terutama pada pasien yang tak punya akses ke peralatan medis canggih untuk deteksi penyakit. Metode ini bisa menjadi alat bantu awal yang efisien dalam skrining massal melalui rontgen dada rutin.

Penelitian ini dipublikasikan di *Radiology: Cardiothoracic Imaging* dengan judul 'Performance of a Chest Radiograph-based Deep Learning Model for Detecting Hepatic Steatosis'. (nei,ist/dya)



HARIAN LENTERA  
Inspirasi Perubahan TODAY

HARIAN "LENERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
www.lenteratoday.com  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | MOJOKERTO: NUR HIDAYAH | LAMONGAN: L HANDI | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | KEDIRI: GATOT SUNARKO | JOMBANG : SUTONO | PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO | BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO | MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Mix and Match

## Celana Cargo, Tak Terbatas Gaya

**M**eskipun potongannya tampak maskulin, tapi celana cargo telah menjadi fashion item yang juga digandrungi kaum hawa. Dulunya, celana dengan banyak kantong itu dibuat untuk kegiatan militer atau aktivitas luar ruangan seperti berkemah dan hiking. Seiring waktu, celana kargo bertransformasi menjadi bagian dari gaya streetwear. Banyak anak muda menggemarinya karena tampilannya yang santai namun tetap modis.

Selain itu, celana cargo bisa dipadukan dengan banyak model atasan, mulai dari santai hingga formal. Sebagai panduan untuk kamu yang masih

bingung mix and match, berikut baju yang cocok untuk celana cargo di bawah ini.

### Kaus Polos atau Tank Top

Untuk kamu yang suka tampil santai dan anti ribet, memadukan celana cargo dengan kaus polos bisa jadi pilihan yang tepat. Kombinasi ini menciptakan kesan kasual dan praktis, cocok untuk aktivitas sehari-hari tanpa perlu effort berlebih namun tetap stylish.

Jika ingin menambahkan sentuhan feminin dan membentuk siluet tubuh, kamu bisa memilih tank top polos sebagai atasan. Selain nyaman, tank top juga memberikan tampilan yang lebih ramping dan tetap cocok dipadukan dengan gaya kasual dari celana cargo.

### Crop Top

Baju yang memperlihatkan pinggang, seperti crop top, sangat cocok dipadukan dengan celana cargo yang berpotongan lebar. Atasan jenis ini membantu menyeimbangkan proporsi tubuh dan menciptakan tampilan yang lebih seimbang

secara visual. Crop top juga menjadi pilihan ideal bagi kamu yang berbadan mungil karena bisa memberikan ilusi tubuh yang lebih tinggi.

Untuk melengkapi gaya ini, kamu bisa menambahkan aksesori seperti bucket hat dan kacamata hitam berukuran besar. Kedua item tersebut mampu menambah volume pada bagian atas tubuh, sehingga penampilanmu tampak lebih proporsional dan standout. Gaya ini cocok digunakan saat hangout santai maupun saat liburan.

### Kaus Motif atau Bergambar

Kaus bermotif atau bergambar bisa memberikan kesan santai dan sedikit rebel saat dipadukan dengan celana cargo. Gaya ini cocok untuk kamu yang ingin tampil lebih ekspresif dan tidak terlalu formal, namun tetap nyaman untuk berbagai aktivitas kasual. Agar penampilan makin standout, sempurnakan dengan tas dan sepatu kets yang mencolok. Pilih warna-warna terang atau desain unik untuk menambahkan elemen menarik pada outfitmu. Perpaduan ini akan membuat tampilanmu lebih hidup dan penuh karakter.

### Hoodie atau Jacket Puffer

Hoodie atau jacket puffer dengan volume besar sangat cocok dipadukan dengan celana cargo. Kombinasi ini menciptakan tampilan bergaya retro yang belakangan ini banyak digemari oleh gen Z. Gaya ini juga memberikan kesan santai namun tetap edgy, cocok untuk digunakan saat cuaca dingin atau sekadar tampil stylish di akhir pekan.

Namun, bagi kamu yang memiliki tubuh mungil, sebaiknya hindari perpaduan oversized ini. Proporsi yang terlalu besar pada bagian atas dan

bawah bisa membuat tubuh terlihat lebih lebar dan tenggelam dalam pakaian. Sebagai alternatif, pilih jaket atau hoodie dengan potongan yang lebih ramping agar tetap nyaman dan proporsional.

### Kemeja

Kemeja yang biasanya identik dengan kesan formal ternyata bisa tampil lebih santai jika dipadukan dengan celana cargo. Agar kesan kasual lebih terasa, pilih kemeja berlempang pendek dan kenakan tanpa dikancing. Gaya ini memberikan tampilan yang relaxed namun tetap rapi, cocok untuk hangout atau kegiatan santai lainnya.

Sebagai dalaman, kamu bisa mengenakan kaus atau tank top berwarna netral seperti putih, abu-abu, atau hitam. Warna-warna tersebut mudah dipadukan dan tetap menjaga kesan minimalis. Perpaduan ini juga membuat tampilanmu lebih berlapis dan menarik tanpa terlihat berlebihan.

### Sweater

Pada musim hujan, celana cargo bisa menjadi pilihan nyaman yang tetap stylish jika dipadukan dengan sweater longgar. Perpaduan ini tidak hanya memberikan kehangatan, tetapi juga menciptakan tampilan yang fresh dan effortless. Sweater dengan bahan lembut akan menambah kesan cozy, cocok untuk suasana mendung atau gerimis ringan. Untuk melengkapi gaya ini, kenakan sepatu kets sebagai alas kaki. Selain praktis, sneakers memberikan sentuhan kasual yang membuat penampilanmu semakin menarik dan dinamis. Gaya ini pas untuk kamu yang ingin tampil modis tanpa mengorbankan kenyamanan di cuaca yang tak menentu. (nei,ist/dya)



**Lembaga Pemerintah (dari Hal 1) ...**

**S**ejumlah kementerian dan lembaga pemerintah yang mengajukan tambahan anggaran dalam RAPBN tahun 2026 ini mendominasi pembahasan di gedung DPR RI pada Senin (7/7/2025). Mulai dari Menteri Per-industrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 2,05 triliun.

Dia mengatakan tambahan ini akan dialokasikan untuk membiayai 255 program prioritas untuk memperkuat sektor industri nasional. Terlebih, tahun ini anggaran Kemenperin mengalami pemblokiran sebesar 23,13 persen atau turun sekitar Rp 582,73 miliar dibandingkan alokasi tahun 2024. Hal itu membuat sejumlah program di sektor industri tidak optimal.

Di lain sisi, Agus memaparkan bahwa pagu indikatif Kemenperin tahun 2026 hanya sebesar Rp 1,94 triliun yang berasal dari Rp 1,52 triliun rupiah murni, Rp 69,8 miliar dari PNB, dan Rp 342,4 miliar dari Badan Layanan Umum.

Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 972,9 miliar, belanja operasional Rp 364,1 miliar, serta belanja non-operasional Rp 599,8 miliar. Dari total pagu tersebut, ia melanjutkan, sekitar Rp 633 miliar digunakan untuk sektor pendidikan, sementara Rp 1,3 triliun dialokasikan untuk mendukung sektor ekonomi.

Selain itu, kata Agus saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Senin (7/7/2025), penambahan anggaran tersebut juga bertujuan untuk mendukung visi pembangunan dalam kerangka Asta Cita.

Kemudian, ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp100,6 miliar untuk rencana kerja dan anggaran tahun 2026. Usulan itu disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Dalam rangka untuk mencapai seluruh program dan target yang ingin kami lakukan pada tahun 2026, kami kembali mengusulkan kepada saudara-saudara pimpinan agar belanja non operasional dan belanja modal kiranya dapat ditambah," kata Yusril saat rapat dengan Banggar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Jika merujuk pada anggaran tahun 2025, menurut dia, terdapat penurunan sebesar 44 persen pada pagu indikatif anggaran 2026 tersebut. Yusril mengatakan pada tahun 2026, kementerianya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp124,6 miliar. Sedangkan pada tahun 2025, anggaran untuk kementerianya itu sudah disepakati sebesar Rp209,1 miliar.

Karena itu, lanjut Yusril, penambahan anggaran diperlukan untuk melaksanakan program-program sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil

Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diantaranya adalah untuk membangun penegakan hukum nasional yang adil hingga menghormati hak asasi manusia.

Dia mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo, menciptakan sinkronisasi dan koordinasi seluruh pembentukan peraturan-peraturan hukum nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, Polri juga mengusulkan kenaikan anggaran hingga 70 persen untuk tahun 2026 menjadi Rp173,4 triliun dari tahun 2025. Usulan itu disampaikan dalam rapat pendahuluan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) di Komisi III DPR RI, Senin (7/7/2025).

Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena), Komjen Wahyu Hadiningrat, mengatakan usulan itu naik sebesar Rp63,7 triliun dari pagu indikatif Polri 2026 sebesar Rp109,6 triliun, atau naik Rp46,8 triliun dari anggaran Polri ada 2025 sebesar Rp126,6 triliun.

Kemudian, Wahyu menjelaskan rincian anggaran tersebut diantaranya untuk kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun, belanja barang Rp13,8 triliun, dan belanja modal Rp45,1 triliun. Pada belanja pegawai, anggaran akan diprioritaskan untuk gaji pegawai rekrutmen, personel baru, dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80 persen personel Polri dan aparat sipil negara (ASN).

Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 18,5 triliun dalam tahun anggaran 2026. Usulan ini disampaikan Plt Jaks Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna. Usulan penambahan anggaran itu karena pagu indikatif (perkiraan awal batas maksimal anggaran) yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mencukupi kebutuhan riil Kejaksaan RI.

"Pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp 8,9 T. Terdapat penurunan sebesar Rp 15,3 triliun atau minus sekitar 63,2 persen dibandingkan pagu alokasi anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 24,2 triliun," kata Narendra dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2024).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa penurunan anggaran ini menjadi perhatian serius mengingat beban kerja Kejaksaan yang terus meningkat, terutama dalam bidang penegakan hukum dan pelayanan publik.

"Pagu indikatif belum memenuhi kebutuhan riil Kejaksaan RI. Berdasarkan analisis Kejaksaan RI, pagu indikatif TA (tahun anggaran) 2026 sebesar Rp 8,9 triliun belum memenuhi kebutuhan riil sebesar Rp 27,4 triliun yang telah diusulkan. Sehingga terjadi defisit Rp 18,52 triliun atau sebesar 67,4 persen,"

jelasnya.

Narendra menyebut, tambahan anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari dukungan manajemen, penegakan hukum, hingga implementasi undang-undang baru serta target pembangunan nasional. Dia bilang, dari total tambahan yang diusulkan, sekitar Rp 16,68 triliun akan digunakan untuk dukungan manajemen. Sementara Rp 1,8 triliun sisanya untuk kebutuhan penegakan dan pelayanan hukum.

Tambahan anggaran ini juga untuk mendukung target kesejahteraan rakyat dalam RPJMN 2025-2029, pelaksanaan rencana aksi nasional, serta agenda pembangunan hukum yang tercantum dalam Asta Cita ke-7 Presiden.

"Usulan tambahan anggaran Kejaksaan RI TA 2026 berdasarkan uraian di atas, pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp 8,9 triliun masih belum memenuhi kebutuhan ideal Kejaksaan RI sebesar Rp 27,4 triliun. Berdasarkan jumlah tersebut maka masih ada kekurangan anggaran mencapai Rp 18,5 triliun," imbuhnya.

Sementara itu, KPU meminta tambahan anggaran sekitar Rp986 miliar ke Komisi II DPR, Senin (7/7/2025). Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan tambahan anggaran itu untuk belanja pegawai dan sejumlah program strategis lain.

"Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja KPU tahun 2026 KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986.059.941.000," kata Afif.

Kemudian Afif merinci untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan kinerja tahun anggaran 2026 sebesar Rp695.816.955.000. Pasalnya, pada 2026 KPU memiliki 2.808 CPNS baru dan 3.486 PPPK yang tersebar mulai pusat hingga daerah.

Selain gaji pegawai, KPU, lanjut dia, juga berencana menggelar pendidikan dan pelatihan dasar bagi mereka pada tahun ini.

Kedua, usulan kenaikan itu diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan JDIIH dan penyuluhan produk hukum, pengelolaan kehumasan, pendidikan pemilih pemula, dan kelompok rentan marjinal, dengan jumlah sebesar Rp290.243.036.000.

"Jadi ini untuk program. Yang A [pertama] untuk kebutuhan gaji dan lain-lain, yang B [kedua] untuk program," kata Afif.

Menurut Afif, KPU memperoleh pagu indikatif sebesar Rp2,76 triliun untuk tahun anggaran 2026. Dari total pagu yang diterima, sekitar Rp1,6 triliun dialokasikan untuk belanja operasional pegawai, sementara Rp1,16 triliun dialokasikan untuk belanja operasional kantor. Sementara, belanja operasional gaji pegawai yang teralokasi pada pagu indikatif 2026 belum mengakomodir belanja gaji dan tunjangan CPNS dan P3K KPU yang diangkat pada tahun anggaran 2025.

Selanjutnya, ada Kemkomdigi yang mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun.

Usulan disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, menjelaskan kebutuhan anggaran Kemkomdigi pada tahun 2026 sebesar Rp20,3 triliun. Namun, pagu indikatif Kemkomdigi yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp12,6 triliun.

"Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja, kebutuhan Komdigi ada di angka Rp20,3 triliun sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp12,615 triliun," kata Ismail di kompleks parlemen.

Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk empat program prioritas yakni pengembangan dan penguatan infrastruktur digital, pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital, komunikasi publik dan media, dan dukungan manajemen.

Pada program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital membutuhkan anggaran tambahan Rp7,75 triliun yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan BTS dan akses internet serta terestrialisasi infrastruktur atau konektivitas melalui jaringan kabel maupun nirkabel yang dioperasikan di permukaan bumi.

Kemudian pada program prioritas penguatan ekosistem dan ruang digital membutuhkan tambahan anggaran Rp2,7 triliun. Anggaran itu untuk pemeliharaan operasional Pusat Data Nasional (PDN) dan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), penanganan konten ilegal, penyelenggaraan pengawasan aktivitas dan transaksi elektronik, dukungan pengawasan ruang digital.

Kemudian untuk program komunikasi publik dan media, Kemkomdigi membutuhkan dana sebesar Rp313 miliar yang belum tercakup dalam pagu indikatif. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan komunikasi publik meliputi pembangunan desa, koperasi, UMKM, sektor pendidikan, akselerasi investasi dan perdagangan global, kesehatan, ketahanan pangan, pertahanan semesta, ketahanan energi, swasembada air, program Makan Bergizi Gratis, dan kegiatan prioritas komunikasi publik.

Terakhir, pada program terkait dukungan manajemen, Kemkomdigi membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. "Ini untuk memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan, dan berbagai hal-hal yang bersifat manajerial untuk menjalankan fungsi pengawasan dan lainnya," terang Ismail.

Sedangkan, Menko Polkam, Budi Gunawan (BG), mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar. Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Banggar DPR dan para Menko Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). (rls,ant,ist/lut)



## RPJMD 2025–2029 Resmi Disahkan

# DPRD JATIM: HARUS MENJAWAB KEBUTUHAN NYATA MASYARAKAT

**SURABAYA** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPRD Senin (7/7/2025) dengan seluruh fraksi menyatakan persetujuannya. Meski demikian, masing-masing fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai koreksi terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan sikap seluruh fraksi yang menyetujui Raperda ini mencerminkan komitmen legislatif untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Jawa Timur.

“Semua fraksi dapat menerima Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, setiap fraksi memiliki kebijakan politis masing-masing yang akan dipertimbangkan dan dituangkan bersama dalam Raperda ini,” ungkapnya saat memimpin rapat.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa menyatakan fraksinya memberikan apresiasi terhadap Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah bekerja secara serius dan menunjukkan keberanian dalam memberikan catatan strategis terhadap draf RPJMD.

Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur tersebut menuturkan keberadaan dokumen RPJMD harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat Jawa Timur. Bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif belaka.

“Penting bagi seluruh fraksi di DPRD untuk memastikan bahwa dokumen ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Bukan hanya sebagai syarat formal penyusunan program pembangunan,” tegas Yordan.



Sidang Paripurna Penandatanganan Persetujuan bersama Penetapan Raperda tentang RPJMD Jawa Timur 2025-2029.

Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, terdapat sejumlah isu mendasar yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan RPJMD ke depan. Pertama, perlunya peninjauan ulang terhadap indikator makro sosial yang dijadikan dasar dalam perencanaan.

Menurut Yordan, indikator tersebut harus disesuaikan dengan data capaian tahun 2024 dan hasil evaluasi terhadap program lima tahun terakhir.

Kedua, pengukuran ketimpangan wilayah tidak cukup hanya menggunakan indeks gini. Ia menyarankan agar Pemprov menggunakan pendekatan lain seperti indeks keterjangkauan layanan dan infrastruktur dasar.

Ketiga, pemerintah diminta segera merespons penurunan kualitas jalan pertanian dengan menyusun rencana konkret pemulihan dan pembangunan jaringan jalan tani. Terutama di wilayah pedesaan dan penghasil pangan.

Yordan juga menekankan pentingnya penguatan layanan dasar kesehatan, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap puskesmas dan tenaga medis.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar pendidikan vokasi dikembangkan lebih luas dan berbasis pada potensi lokal, sehingga dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor produktif yang ada di daerah.

Ia menegaskan kelemahan-kelemahan dalam RPJMD sebelumnya harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali. Oleh karena itu, ia meminta agar dalam RPJMD yang baru ini, Pemprov Jatim memperbaiki artikulasi kebijakan agar lebih mampu membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat. Selain itu juga meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan.

Ia juga menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam menetapkan indikator kinerja, dengan menyesuaikan realitas sosial-ekonomi dan kemampuan daerah dalam mencapainya.

“Kami berharap agar fokus utama RPJMD ini adalah pada pengurangan angka kemiskinan, peningkatan lapangan pekerjaan, dan penyempitan kesenjangan pembangunan antarwilayah,” tambahnya.

Lebih jauh, Erick juga mengingatkan RPJMD ini tidak boleh berhenti menjadi dokumen formal yang sekadar dijadikan pedoman administratif oleh perangkat daerah. Ia meminta agar visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD benar-benar diterjemahkan dalam bentuk program dan kebijakan yang konkret, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Setelah disahkan menjadi Perda, dokumen ini harus menjadi pedoman nyata yang mampu mengarahkan birokrasi untuk bekerja lebih terarah dan berorientasi pada hasil. Bukan hanya sekadar wacana di atas kertas,” pungkasnya. (adv,pra/lut)

“Kita tidak bisa bicara bonus demografi jika tidak ada dukungan serius terhadap pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan pasar kerja lokal,” imbuhnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Timur, Erick Komala, juga menyampaikan pandangan serupa. Pihaknya menekankan seluruh dokumen tersebut harus berpijak pada realitas capaian masa lalu dan tantangan aktual.

“Kami sepakat dan setuju terhadap RPJMD 2025–2029 yang dirancang untuk memastikan pembangunan Jatim lebih sejahtera. Tapi harus realistis. Kami mencermati bahwa dalam periode sebelumnya ada dua indikator kinerja utama yang tidak tercapai,” jelas Erick.



Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf saat Penandatanganan Persetujuan Taperda RPJMD Jatim 2025-2029.